

TESIS

**YURISDIKSI KRIMINAL BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL
TERHADAP *CYBERCRIME* DI LUAR YURISDIKSI INDONESIA**



Dosen Pembimbing:

Prof. Firman Hasan, S.H., LL.M.

Yoserwan, S.H., M.H., LL.M.

Oleh:

NAMA : RAHAJENG INDRASWARI

NIM/BP : 1520112060

MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

YURISDIKSI KRIMINAL BERLAKUNYA HUKUM PIDANA NASIONAL TERHADAP *CYBERCRIME* DI LUAR YURISDIKSI INDONESIA

(Rahajeng Indraswari, S.H., NIM: 1520112060. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman 99, Tahun 2017)

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi informasi telah mengubah dunia ke era *cyber*. Perkembangan ini membawa manfaat kepada manusia berupa kemudahan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah dan waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di negara yang berbeda. Ketiadaan batasan wilayah dalam *cybercrime* ini membuat pelaku kejahatan dapat melakukannya di mana saja sehingga dapat melanggar kedaulatan suatu negara. Pelaku dapat melakukan kejahatan di negaranya dengan target yang berada di negara lain. Hal ini menimbulkan masalah yurisdiksi dalam pengusutan kasusnya sehingga dibutuhkan yurisdiksi hukum untuk menyelesaikannya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah: 1). Bagaimana penerapan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap orang yang melakukan *cybercrime* di luar yurisdiksi Indonesia? 2). Bagaimana upaya yang efektif untuk pemberlakuan yurisdiksi yang diperluas untuk menangani *cybercrime* yang terjadi di lintas batas negara? Untuk membahas kedua masalah tersebut, tesis ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Tesis ini membahas mengenai penerapan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap orang yang melakukan *cybercrime* di luar yurisdiksi Indonesia, sebelum adanya UU ITE telah diatur beberapa peraturan untuk menangani *cybercrime*. Dimulai dari KUHP, kemudian kriminalisasi *cybercrime* diatur di luar KUHP berupa Undang-Undang Pidana Khusus. Mengenai upaya yang efektif untuk pemberlakuan yurisdiksi yang diperluas untuk menangani *cybercrime* yang terjadi di lintas batas Negara, maka digunakan prinsip-prinsip yurisdiksi yaitu prinsip teritorial subyektif, teritorial obyektif, prinsip nasional aktif maupun nasional pasif, dan prinsip universal. Selain menggunakan prinsip di atas, upaya lain yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan transnasional yaitu berupa perjanjian ekstradisi, *mutual legal assistance* (MLA), dan *transfer of proceeding*. Upaya-upaya tersebut hanya bisa dilakukan berdasarkan prinsip persamaan saling menghargai kedaulatan serta berdasarkan hubungan baik timbal balik antar Negara.

Kata Kunci: *Cybercrime*; Yurisdiksi; Kedaulatan

CRIMINAL JURISDICTION ENACTING NATIONAL CRIMINAL LAW AGAINST CYBERCRIME OUTSIDE THE JURISDICTION OF INDONESIA

(Rahajeng Indraswari, S.H., NIM: 1520112060. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman 99, Tahun 2017)

ABSTRACT

The development of information technology has changed the world to the era of cyber. This development brings benefits to humans in the form of convenience. Despite that, there is a problem of a crime called cybercrime, this crime does not recognize the boundaries and time because the victims and perpetrators are often located in different countries. Because the boundaries in cybercrime is making the perpetrators can do it anywhere so it can breaking the sovereignty of a country. The perpetrator may commit a crime in his country with a target residing in another country. This raises the issue of jurisdiction in the investigation of the case so that legal jurisdiction is required to resolve it. The formulation of the problem in this thesis is: 1). How is the application of criminal jurisdiction enacting national criminal law against people who commit cybercrime outside the jurisdiction of Indonesia? 2). How is the effective effort to enact an expanded jurisdiction to deal with cybercrime that occurs across borders? To discuss both problems, this thesis is a normative juridical research methodology with analytical descriptive research. This thesis discusses the application of criminal jurisdiction of the enactment of national criminal law against people who conduct cybercrime outside the jurisdiction of Indonesia, before the Law on ITE has been set some rules to deal with cybercrime. Starting from the Criminal Code, then criminalization of cybercrime is regulated outside the Criminal Code in the form of Special Criminal Law. Regarding effective efforts for the enactment of expanded jurisdiction to deal with cybercrime occurring across national borders, jurisdictional principles are used namely subjective territorial, objective territory, active national and passive national principles, and universal principles. In addition to using the above principles, other efforts that can be done to combat transnational crime in the form of extradition treaties, mutual legal assistance (MLA), and transfer of proceeding. Such efforts can only be made on the principle of equality of mutual respect for sovereignty and on the basis of mutual relations between States.

Keywords: *Cybercrime*; **Jurisdiction**; **Sovereignty**